



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v10i2.825>



MODEL PERCEPATAN AKREDITASI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG

Ikka Kartika Abbasfauzi

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Islam Nusantara Bandung

email: ikka.kartika@uninus.ac.id

Naskah diterima, 29 Mei 2020; direvisi, Juli 2020; disetujui, November 2020; publikasi online Desember 2020

Abstrak

Amanah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai peraturan menteri telah menekankan tentang pentingnya kelayakan penyelenggaraan PKBM sebagai satuan pendidikan melalui akreditasi. Pada kenyataannya, banyak kendala yang ditemukan, apalagi sejak diberlakukannya Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena 2.0) yang berbasis website. Upaya sosialisasi yang dilakukan berkali-kali oleh berbagai pihak, kurang mendapat respons positif hingga masa pengajuan akreditasi hampir berakhir. Kondisi ini mendorong Forum PKBM Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan model strategi percepatan yang mengacu pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Alhasil model ini mampu meningkatkan jumlah PKBM yang terakreditasi pada tahun 2019 hingga sebesar 74,33 % dari jumlah PKBM di Kabupaten Bandung, padahal jumlah tahun sebelumnya hanya sebanyak 47,30 % . Artinya pada tahun 2019 ada kenaikan sekitar 27,03 %.

Kata kunci: akreditasi, model percepatan, peningkatan hasil.

Abstract

Mandate of law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and various ministerial regulations have emphasized the importance of the feasibility of organizing PKBM as an education unit through accreditation. Many obstacles have been found, especially since the introduction of the website-based Accreditation Assessment System (Sispena 2.0). Socialization efforts carried out many times by various parties did not get a positive response until the accreditation submission period was almost over. This condition prompted the West Java Province PKBM Forum to develop an acceleration strategy model that refers to measures of community empowerment. As a result this model was able to increase the number of accredited PKBM in 2019 to 74.33% from the number of PKBM in Bandung Regency, whereas the previous year's number was only 47.30%. This means that in 2019 there will be an increase of about 27.03 %.

Keywords: accreditation, acceleration model, improved results.

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Dalam pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dinyatakan bahwa untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dilakukan akreditasi. Undang-undang ini ditindaklanjuti

dengan berbagai peraturan menteri, diantaranya Permendiknas Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan non formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Peraturan ini mengalami berbagai penyempurnaan melalui peraturan-peraturan sejenis lainnya, dan yang terakhir berlaku Permendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, selanjutnya disebut PKBM, merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, termasuk lembaga pendidikan yang harus diuji kelayakannya melalui akreditasi. Dalam data yang tercantum dalam website Kemendikbud, di Indonesia hingga semester ganjil 2019/2020 terdapat 9.576 PKBM, diantaranya 81 lembaga berada di Kabupaten Bandung. Menurut informasi Forum PKBM Jawa Barat, dari jumlah tersebut baru sekitar 47,30 % yang terakreditasi. Menurut Hasan Bisri, Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) 25-28 Maret 2019 di Sulawesi Selatan, secara nasional, jumlah PKBM yang telah terakreditasi hanya mencapai 1.800 an lembaga atau sekitar 16,62 %. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah pada tahun 2019 menargetkan 5000 PKBM terakreditasi.

Bagi Forum PKBM Provinsi Jawa Barat dan Forum PKBM Kabupaten Bandung, percepatan ini menjadi beban berat mengingat masih banyak kendala yang berasal dari persepsi para pengurus PKBM. Hasil diskusi dengan Ketua Forum PKBM Provinsi Jawa Barat dan Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah berulang kali mengingatkan, hanya lembaga PKBM yang

terakreditasi yang diperbolehkan mengajukan bantuan program kepada pemerintah. Namun peringatan ini nampaknya kurang mendapat respons, terbukti masih rendahnya jumlah PKBM yang mengajukan akreditasi dengan alasan “belum siap”.

Kondisi di atas mendorong Forum PKBM Jawa Barat untuk membentuk Tim Percepatan Akreditasi PKBM

Masalah

Informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan beberapa pengurus PKBM di Kabupaten Bandung, bahwa penyebab ketidak-siapan ini didorong oleh berbagai faktor, diantaranya :

1. Faktor materi akreditasi, PKBM merasa tidak siap untuk menyiapkan materi yang mejadi persyaratan akreditasi;
2. Faktor biaya, PKBM merasa tidak siap untuk mendanai proses akreditasi yang dianggap mahal;
3. Faktor kemampuan IT. Sebagian PKBM kurang paham penggunaan sistem penilaian akreditasi berbasis web (Sispena);
4. Faktor kemandirian. Bagi PKBM yang sudah mandiri, tidak tergantung pada bantuan pemerintah, memiliki pemikiran “mendua”, yaitu antara perlu dan tidak perlu untuk melakukan akreditasi. Karena tanpa akreditasipun keberadaan lembaga tersebut tetap diakui masyarakat pengguna.

Dari informasi yang diperoleh, faktor ketidak-siapan ini karena adanya pemahaman yang belum lengkap sehingga gambaran tentang akreditasi hanya berdasarkan dugaan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat penerapan akreditasi berbasis online dengan menggunakan Sispena baru dilakukan satu tahun sebelumnya.

Di sisi lain, sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya menyampaikan tentang kebijakan, materi yang harus disiapkan dan pengenalan aplikasi Sispena. Selesai kegiatan sosialisasi,

kurang ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih bersifat praktis dan mengerucut ke arah persiapan akreditasi secara nyata.

Jika PKBM dituntut harus memenuhi aturan yang berlaku dalam akreditasi, maka perlu dilakukan kegiatan yang tidak sekedar menyampaikan informasi, tapi juga kegiatan yang dapat memotivasi minat untuk menyiapkan persyaratan akreditasi bahkan terdorong untuk mengajukan akreditasi. Kirkpatrick di dalam bukunya *Evaluating Training Programs* (2008:23) menyatakan bahwa agar supaya perubahan terjadi, ada empat kondisi yang harus dipenuhi yaitu : (1) The person must have a desire to change ; (2) The person must know what to do and how to do it; (3) The person must work in the right climate; (4) The person must be rewarder for changing. Untuk mencapai hal tersebut Kirkpatrick menetapkan empat level kategorisasi hasil pelatihan, yaitu : (1) level reaction, yaitu mengukur tingkat reaksi peserta terhadap pelatihan ; (2) level learning, yaitu untuk mengukur tingkat perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta setelah mengikuti pelatihan ; (3) level behaviour, yaitu untuk mengukur sejauh mana peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihannya dalam pekerjaan; dan (4) level result, yaitu untuk mengukur dampak pelatihan terhadap pekerjaannya.

Jika dikaitkan dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan selama ini nampaknya baru sampai level reaction, padahal mereka dituntut agar mampu menyiapkan dan mengusulkan akreditasi. Dalam hal ini nampak bahwa ada 3 level lagi yang harus dilewati PKBM bisa mengusulkan akreditasi, yaitu level learning, behaviour dan result. Jadi wajarlah jika PKBM belum termotivasi untuk mengajukan akreditasi, karena memang baru sampai pada tingkat mampu menunjukkan reaksi terhadap materi sosialisasi. Selebihnya belum digarap sampai tuntas.

Tujuan

Berdasarkan alasan itulah Forum PKBM Jabar merasa berkewajiban untuk membina PKBM-

PKBM tersebut dengan tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya akreditasi bagi kelayakan lembaga sebagai penyelenggara pendidikan non formal;
2. Meluruskan tentang berbagai kesalahan pemahaman tentang pelaksanaan akreditasi;
3. Memberikan pendampingan persiapan akreditasi hingga PKBM siap untuk diakreditasi pada tahun 2019.

Jika tujuan tersebut tercapai, bisa diharapkan PKBM yang belum terakreditasi termotivasi untuk melakukan akreditasi. Pelaksanaan pembinaan ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan para asesor PKBM Provinsi Jawa Barat.

B. METODE

Untuk mengatasi masalah di atas, dilakukan solusi melalui langkah-langkah yang identik dengan proses pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) berikut ini:

1. Tahap penyadaran, yaitu memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi;
2. Tahap pengkapasitasan, terutama yang berkaitan dengan pengkapasitasan manusia yang dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok;
3. Tahap pemberian daya (empowerment) berkaitan dengan pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap penyadaran dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, bekerjasama dengan forum PKBM Kabupaten Bandung, Forum PKBM Jawa Barat, Badan Akreditasi Nasional Provinsi (BAN-P) Jawa Barat (yang terdiri dari anggota BAN-P Jawa Barat dan Asesor PKBM Jawa Barat);
2. Tahap pengkapasitasan dilakukan melalui kegiatan workshop dan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Tim Percepatan Akreditasi PKBM yang dalam pelaksanaannya melibatkan BAN-P Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan asesor PKBM Jawa Barat;
3. Tahap pemberian daya (empowerment) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan untuk mempersiapkan materi akreditasi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Percepatan, khususnya oleh para asesor PKBM Jawa Barat.

Pelaksanaan kegiatan tahap penyadaran melalui sosialisasi, dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung atau dalam pertemuan-pertemuan Forum PKBM Kabupaten Bandung sejak bulan Februari 2019. Tahap pengkapasitasan dalam bentuk workshop dilaksanakan di Hotel Antik Soreang Kabupaten Bandung pada bulan September 2019, dan dilanjutkan dengan kegiatan Bimtek. Tahap pemberian daya dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang dilaksanakan sesudah selesai kegiatan Bimtek hingga bulan Oktober 2019, menjelang kegiatan akreditasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah awal melakukan sosialisasi, yang dilaksanakan beberapa kali, baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, BAN-P Jawa Barat maupun Forum PKBM Jawa Barat serta Forum PKBM Kabupaten Bandung. Isi sosialisasi terdiri dari kebijakan pemerintah menyangkut

: (1) Landasan Yuridis Terkait Akreditasi PAUD dan PNF; (2) Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi; (3) Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung; (4) Kebijakan lainnya berkaitan dengan bantuan operasional untuk PKBM, bahwa hanya PKBM yang terakreditasi yang diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan operasional dari pemerintah.

Namun sosialisasi nampaknya kurang mendapat respons PKBM, terbukti dari kurangnya jumlah PKBM yang mengusulkan akreditasi. Di sisi lain pemerintah pusat menargetkan sebanyak 5000 PKBM bisa terakreditasi pada tahun 2019. Kondisi ini mendorong Forum PKBM Jawa Barat untuk membentuk Tim Percepatan Akreditasi PKBM yang memfokuskan diri pada penanganan masalah ketidak-siapan PKBM untuk mengusulkan akreditasi. Anggota tim terdiri dari pengurus Forum PKBM Jawa Barat, sedangkan nara sumber terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Pengurus BAN-Provinsi Jawa Barat, asesor PKBM Jawa Barat, Ketua Forum PKBM Jawa Barat dan Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung. Pendamping terdiri dari Asesor PKBM Jawa Barat. Tim ini akan menangani permasalahan PKBM di 15 Kabupaten /Kota di Jawa Barat yang termasuk kurang aktif mengajukan akreditasi, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Bandung.

Langkah berikutnya, Tim Percepatan melakukan pengkapasitasan melalui workshop pada tanggal 5-6 September 2019 di Hotel Antik Soreang Kabupaten Bandung, dan dilanjutkan dengan Bimtek pada hari berikutnya. Workshop diikuti oleh 35 PKBM yang berminat untuk mengajukan akreditasi. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung. Materi workshop 30 % tentang kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan 70 % berisi tentang penggunaan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi 2.0 (Sispna 2.0) PAUD dan PNF .

1. Materi kebijakan isinya hampir sama dengan saat sosialisasi, hanya nara sumber lebih menekankan pada upaya untuk membangkitkan motivasi para pengurus

PKBM agar memahami pentingnya pengajuan akreditasi bagi keberadaan PKBM di waktu yang akan datang.

2. Materi penggunaan aplikasi Sispena 2.0 PAUD dan PNF membahas tentang cara pengisian instrumen akreditasi dan pengunggahan (upload) dokumen-dokumen akreditasi berbasis online. Aplikasi ini baru digunakan pada tahun 2018 dengan nama Sispena PAUD dan PNF, kemudian pada awal tahun 2019 sistemnya disempurnakan dan diberi nama Sispena 2.0 PAUD dan PNF. Sebelum tahun 2018 digunakan sistem secara manual, dokumen disusun dalam bentuk hard copy, dan usulan harus dibuat rangkap 2 (dua) serta dikirimkan langsung ke kantor BAN-P PAUD & PNF di Kota Bandung.

Sebenarnya sistem pengisian akreditasi berbasis online ini lebih efisien karena PKBM tidak usah menggandakan seluruh dokumen lembaga yang jumlah halamannya bisa sampai ratusan lembar, dan tidak usah mengantarkan ke Bandung, cukup dilakukan di daerahnya masing-masing. Dokumen yang diunggah juga tidak usah seluruhnya, cukup beberapa dokumen yang bisa mewakili aspek yang diminta. Sisa dokumen bisa diperlihatkan saat dilakukan visitasi oleh asesor PKBM. Namun kesulitan sebagian PKBM adalah saat mengisi instrumen, memilah dan memilih dokumen serta mengunggahnya ke dalam Sispena 2.0, karena kenyataannya tidak seluruh PKBM memiliki tenaga yang terampil mengoperasikan komputer dan memahami penggunaan internet untuk kepentingan pengisian sistem. Dokumen yang akan dinilai dalam akreditasi dan harus diisikan ke dalam Sispena 2.0 mencakup 8 Standar Pendidikan Nasional, yang terdiri dari: Standar Kompetensi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Peserta diberi penjelasan secara rinci apa saja yang harus disiapkan dan diunggah. Dalam pelaksanaan Bimtek peserta berlatih tentang cara mengisi instrumen Sispena 2.0 secara online dan mengunggah dokumen-dokumen untuk akreditasi. Pada saat Bimtek, pengurus

mengikutsertakan operator PKBM, atau tenaga pendidik / tutor yang mahir mengoperasikan komputer.

Langkah terakhir dilakukan pendampingan terhadap peserta yang dilakukan oleh para asesor PKBM Jawa Barat. Pendampingan dilakukan secara berkelompok, berdasarkan kedekatan lokasi. Tempat pendampingan di lokasi PKBM yang telah disepakati oleh kelompok, sedangkan waktu ditentukan bersama dengan asesor PKBM yang akan mendampingi.

Pendampingan ini tidak diikuti oleh seluruh PKBM peserta workshop dan Bimtek karena ada sebagian yang sudah mampu mempersiapkan sendiri dokumen-dokumennya sekaligus mengunggahnya ke dalam aplikasi. Sedangkan kondisi PKBM yang mengikuti pendampingan dapat dibagi ke dalam tiga kategori berikut ini :

1. Pengurus PKBM sudah mampu mempersiapkan sebagian besar kelengkapan dokumen akreditasi dan memiliki kemampuan mengaplikasikan Sispena 2.0 secara online, namun masih ada kendala dalam menyediakan beberapa dokumen akreditasi sesuai permintaan sistem. Kendalanya, tuntutan dokumen akreditasi tidak sama dengan dokumen yang selama ini digunakan PKBM, atau dokumen akreditasi kurang sesuai dengan kondisi yang dimiliki PKBM atau dokumen akreditasi memang belum pernah diterapkan di PKBM.
2. Pengurus PKBM sudah mempersiapkan kelengkapan dokumen namun kurang mampu untuk mengisi instrumen Sispena 2.0 dan mengunggah dokumen akreditasi sesuai permintaan sistem secara online. Dalam kategori ini juga masih ada ketidaksamaan antara dokumen yang digunakan PKBM dengan dokumen sesuai permintaan sistem, atau dokumen kurang sesuai dengan kondisi yang dimiliki PKBM atau dokumen tersebut memang belum pernah diterapkan di PKBM.
3. Pengurus PKBM belum mempersiapkan dokumen sesuai ketentuan akreditasi dan belum mampu mengisi instrumen Sispena

2.0 dan mengunggah dokumen secara online, namun mereka sangat antusias untuk mengajukan akreditasi.

Pendampingan terhadap kategori pertama hanya memakan waktu paling lama satu pertemuan untuk memberikan pengarahan tentang penyusunan dokumen-dokumen yang belum sesuai dengan tuntutan akreditasi. Pendampingan terhadap kategori kedua memerlukan waktu lebih lama daripada kategori pertama, biasanya sekitar 1- 2 pertemuan karena harus membimbing penyempurnaan dokumen dan pengisian instrumen Sispena 2.0. Pendampingan paling lama terjadi pada PKBM kategori tiga, paling sedikit 3-4 pertemuan, bahkan di kabupaten lain ada yang minta didamping hingga 5- 10 pertemuan.

Jumlah asesor PKBM yang bertindak sebagai pendamping kelompok (2-3 PKBM) paling sedikit satu orang. Namun bila lembaga yang didampinginya cukup banyak (di atas 4 PKBM) dan masalahnya cukup berat, biasanya melibatkan paling sedikit dua orang asesor PKBM, bahkan jika waktu pengajuan akreditasi sudah mendekati batas akhir, biasanya satu asesor mendampingi satu PKBM. Kadang-kadang asesor meminta PKBM yang sudah terakreditasi atau yang sudah selesai mengajukan akreditasi, untuk membantu mendampingi sesama PKBM dengan pendekatan peer learning.

Hasil kegiatan pendampingan adalah bertambahnya jumlah PKBM yang mengajukan akreditasi dan PKBM yang terakreditasi. Menurut data yang diperoleh, jumlah PKBM yang telah terakreditasi pada tahun 2019 sebanyak 55 PKBM atau sekitar 74,33 % dari jumlah PKBM yang tercatat di Forum PKBM Kabupaten Bandung (74 PKBM), padahal pada tahun 2018, jumlah yang terakreditasi hanya sekitar 35 PKBM atau 47,30 % dari seluruh jumlah PKBM. Artinya pada tahun 2019 ada kenaikan sekitar 27,03 %. Atas capaian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung bisa bernapas lega karena 74,33 % PKBM di wilayahnya sudah terakreditasi.

Tahun 2020 diharapkan sisanya, yaitu 25,67

% PKBM, bisa mengajukan akreditasi.

D. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan program percepatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan workshop, Bimtek dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan PKBM dapat merubah persepsi keliru tentang prosedur akreditasi yang dianggap mahal, sulit dan rumit. Penanganan yang tepat dengan menggunakan pendekatan menyeluruh sesuai kebutuhan serta menggunakan pendekatan peer learning, menjadi kunci keberhasilan program percepatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Forum PKBM Jawa Barat, bapak Nana Suryana, MPd, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk bergabung dalam Program Percepatan Akreditasi PKBM dari bulan September s.d. Oktober 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN PAUD dan PNF.2019. Panduan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF di Kabupaten/ Kota Tahun 2019 (Online). Available at <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/download-center> (verified 15 Mei 2020)
- BAN PAUD dan PNF. 2019. Panduan Penilaian Akreditasi Satuan Pendidikan Tahun 2019. (Online). Available at <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/download-center> (verified 15 Mei 2020)
- Kirkpatrick, D & James Kirkpatrick. 2008. Evaluating Training Programs (Third Edition), The Four Levels. Barret-Koehler Publishers, Inc. San Fransisco.
- Paud-Dikmas Kemdikbud.2019. Jumlah Satuan Pendidikan PKBM 2019/2020 Genap. (Online). Available at <https://manajemen.>

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>

DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v10i2.825>

[paud-dikmas.kemdikbud.go.id/Rekap/
PKBM-Satuan-Pendidikan](http://paud-dikmas.kemdikbud.go.id/Rekap/PKBM-Satuan-Pendidikan) (verified 15 Mei
2020)

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho
Dwidjowijoto. 2007. Manajemen
Pemberdayaan: Sebuah Pengantardan
Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.
Jakarta, Media Komputindo.